

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamid. S. Attamimi. 1993. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Bersifat Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita Iv)*, Disertasi Doktor, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Almond. Gabriel A.. and G. Bingham Powell. Jr.. 1966. *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: Little. Brown and Company. Inc..
- Agus Riwanto. 2016. *Hukum Partai Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1998. Jakarta: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Balai Pustaka.
- Donald P Kommers. Paper –presented at the annual meeting of the American Political Science Assosiation) Los Angeles. Calif. September 11. 1970) dalam Henry J. Abraha. 1975. *The Judicial Process- An Introduction of the court of the United States of America*. England. and France. Third Edition Revised and Enlarged. Oxford Universiy Press. hlm. 281-283
- E.E. Schattschneider dalam Feri Amsari, Charles Simabura, dan Khairul Fahmi, dkk. 2020. *Pembaruan Partai Politik di Indonesia Demokratisasi Internal Partai Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Gede Marhaendra Wija, Dkk. 2018. *Hukum Perundang-Undangan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hans Kelsen. 2006. “*General Theory Of Law And States (Teori Umum Tentang Negara Dan Hukum)*”. Bandung: Penerjemah Raisul Multaqien, Nusa Media & Nuansa.
- Harold Joseph Laski. 1931. *An Introduction to Politics*. London: George Allen& Unwin Ltd..
- Isharyanto. 2017. *Partai Politik. Ideologi. dan Kekuasaan*. Yogyakarta: CV Absolute Media..

- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- _____. 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2021, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta,
- _____. 2020. *Teori Hirarki Norma Hukum*. Jakarta: Kontitusi Pres.
- Lili Romli. dkk. 2008. *Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia*. Depok: PUSKAPOL FISIP UI.
- Maurice Duverger. 2012. *Partai Politik Dan Kelompok-Kelompok Penekan*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Maria Farida Indrati. 2006. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanikus.
- Miriam Budiardjo. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Ali Safa'at. 2011. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers..
- Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih. 1993. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Peter Cane. *Understanding Judicial Review and Its Impact*. Ed. By Marc Hertogh and Simon Halliday. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ramlan Surbakti. 1982. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Richard S. Katz dan William Crotty. 2006. *Handbook of Party Politics*. London: SAGE Publications.
- Robert Michael. 2001. *Political Parties: A Sociological Study of The Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. Canada: Batoche Book.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Meotodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers..

Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : FH UI Press..

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Pers.

Yuliandri. 2020. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: Rajawali Pers.

Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Malang: Setara Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

C. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat

D. Jurnal dan Website

Andri Setiawan, Antikowati-, And Bayu Dwi Anggono. 2021. 'Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Kostitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung', *Jurnal Legislasi Indonesia*,

Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran dalam R Muhammad Miharadi, Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Pendanaan Partai Politik Dalam Mengatasi Oligarki Yang Mendistorsi Demokrasi, *Jurnal Keadilan Pemilu, Volume 2 Tahun 2021*.

Fahri Bachmidl dan Diani Indah Rachmitasari, 2022, "The Supreme Court's Authority: Judicial Review of Statutes and By-Laws of Political Parties against Laws", *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*,

Firman Noor, 2017, "Fenomena Post Democracy Party Di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik Dan Dampaknya", *Jurnal Penelitian Politik, Volume 14 No. 2 Desember 2017*,

Hera Alvina Satriawan. 2022. Kedudukan Ad/Art Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Uji Materil Oleh Mahkamah Agung, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 5 Nomor 1*.

Rizqo Dzulqornain Dan Ridho Hadi Nurriszky. 2021. "Pengajuan Pengujian Ad/Art Partai Politik Di Mahkamah Agung". *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam, Vol. 1. No. 2*.

Sunaryati Hartono Dalam Tri Cahya Indra Permana, Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal, *Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016*.

Tri Cahya Indra Permana, Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal, *Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016*,

"Sindir Yusril, Pakar: Ma Tidak Berwenang Menguji Ad/Art Parpol,"
https://www.viva.co.id/berita/politik/1411466-sindir-yusril-pakar-ma-tidak-berwenang-menguji-ad-art-parpol?Page=All&Utm_Medium=All-Page,